PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PENGELOLAAN DANA DESA

¹Susilawati, ²Panca Sarjana Putra, ³Annisa Shafa Anki Naz
Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara
susilawati@fh.uisu.ac.id, pancash2601@gmail.com

Abstrak

Korupsi merupakan fenomena yang masih memerlukan perhatian lebih karena merupakan kejahatan luar biasa yang dampaknya merugikan masyarakat. Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tindak pidana korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Perilaku korupsi ini sudah menjalar kesemua lapisan masyarakat, salah satu pelaku korupsi diantaranya adalah Kepala Desa. Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa seperti diatur dalam pasal 26 ayat (4) huruf i undang – undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, bahwa Desa dipimpin oleh seorang Kepala Desa yang salah satu kewajibannya antara lain mengelola Keuangan dan Aset Desa. Tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan desa adalah segala tindakan yang dapat merugikan keuangan maupun perekonomian negara maupun desa. Sehingga segala tindakan yang dilakukan dapat merugikan masyarakat desa, pemerintah desa dan semua lapisan. Berdasarkan kenyataan tersebut diatas, maka mendorong penyuluh untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat dengan model penyuluhan hukum yang berjudul Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Suka Beras Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Dalam pengelolaan Dana Desa yang merupakan judul materi penyuluhan hukum di Desa Suka Beras Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai sebagai edukasi pendidikan anti korupsi serta menambah pemahaman dan upaya preventif atau pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi di lingkungan Desa Suka Beras Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai.

Kata Kunci : Pencegahan, Tindak Pidana Korupsi, Dana Desa

Abstrack

Corruption is a phenomenon that still requires more attention because it is an extraordinary crime whose impact is detrimental to society. According to Law no. 20 of 2001 concerning amendments to Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption, corruption is not only detrimental to state finances but also a violation of the social and economic rights of the community at large. This corrupt behavior has spread to all levels of society, one of the perpetrators of corruption is the Village Head. In the administration of village governance as regulated in Article 26 paragraph (4) letter i of Law number 6 of 2014 concerning Villages, that the Village is led by a Village Head, one of whose obligations is to manage Village Finance and Assets. Corruption in the management of village finances are all actions that can harm the finances and economy of the state and village. So that all actions taken can harm the village community, village government and all levels. Based on the above facts, it encourages extension workers to do community service with a legal counseling model entitled Prevention of Corruption Crimes in the Management of Village Funds in Suka Beras Village, Perbaungan District, Serdang Bedagai Regency. Suka Beras Village, Perbaungan District, Serdang Bedagai Regency, as an anti-corruption education education as well as increasing understanding and preventive measures or preventing the occurrence of criminal acts of corruption in Suka Beras Village, Perbaungan District, Serdang Bedagai Regency.

Keywords: Prevention, Corruption, Village Funds

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Korupsi menjadi masalah yang sulit untuk diatasi di Indonesia, setiap tahun ada saja pejabat yang terseret kasus korupsi dari pajak, sapi bahkan hal-hal yang berhubungan dengan aktifitas keagamaan seperti dana haji dan pengadaan Al-qur'an tidak luput untuk dikorupsi. Segala bentuk cara telah dilakukan oleh negara untuk memberantas pergerakan korupsi namun sampai sekarang korupsi masih berkeliaran dan tumbuh subur di seluruh wilayah Indonesia. Seolah menjadi ulat, Korupsi terus menggerogoti negara dan melubangi keuangan negara.

Di Indonesia, tindak pidana korupsi sudah terjadi secara meluas dalam masyarakat. Perkembangannya terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kerugian keuangan negara dan banyaknya kasus yang terjadi maupun dari segi ruang lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat serta segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis. Terjadinya peningkatan tindak pidana korupsi yang tidak terkendali dapat membawa bencana tidak hanya terhadap kehidupan perekonomian nasional akan tetapi juga terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara.

Korupsi merupakan fenomena yang masih memerlukan perhatian lebih karena merupakan kejahatan luar biasa yang dampaknya merugikan masyarakat. Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang

perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tindak pidana korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas.

Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah untuk melakukan pemberantasan terhadap tindak pidana korupsi. Beberapa oknum dengan latar belakang jabatan dan pendidikan yang melakukan berbagai kasus korupsi dapat dijadikan pelajaran berharga bagi pemangku kebijakan dan seluruh lapisan masyarakat. Banyak para pejabat publik setingkat menteri, gubernur, bupati/walikota, maupun pejabat level bawah yang melakukan korupsi. Padahal jika dikaitkan dengan tingkat kesejahteraan, baik pendidikan maupun keluarga, rata-rata mereka (pelaku kejahatan korupsi) berada pada level sejahtera. Perilaku korupsi dapat dipengaruhi oleh kesempatan dan peluang serta orientasi kepentingan pribadi maupun kelompok.

Perilaku korupsi ini sudah menjalar kesemua lapisan masyarakat, salah satu pelaku korupsi diantaranya adalah Kepala Desa. Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa seperti diatur dalam pasal 26 ayat (4) huruf i undang – undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, bahwa Desa dipimpin oleh seorang Kepala Desa yang salah satu kewajibannya antara lain mengelola Keuangan dan Aset Desa.

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan

pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa). Pemerintahan desa dalam pembagian wilayah administratif Indonesia berada di bawah kecamatan, Desa dipimpin oleh seorang kepala desa. Penyelenggara pemerintahan desa merupakan sub sistem dari penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya.¹

Kedudukan sebuah desa secara yuridis formal diakui dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomo 6 Tahun 2014 tentang Desa. Desa diartikan sebagai desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut dengan Desa yaitu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat sekitar berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal/usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kelonggaran yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintahan desa untuk mengelola dana desa membawa banyak manfaat terutama dalam pembangunan di

desa. Namun dengan demikian, wewenang tersebut jika tidak diimbangi dengan sadar hukum justru akan membawa kesulitan bagi aparat desa bahkan akan menimbulkan kerugian bagi masyarakat desa. Desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat dan pemerintahan di Indonesia. Jauh sebelum bangsa-bangsa modern tersebut, kelompok sejenis desa atau masyarakat adat dan lain sebagainya menjadi bagian penting dalam suatu tatanan negara.²

Terbitnya UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa menjadikan dana desa sesuatu hal yang sangat menggiurkan karena nilai dana desa mencapai 1 M. Adanya kasus yang menyeret oknum aparatur desa, menjadikan pengelolaan keuangan dana desa benar-benar sangat perlu dikawal, dan diawasi oleh semua lapisan. Terkait urusan dana desa yang saat ini yang selalu menjadi pembahasan menarik di berbagai kalangan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menemukan sejumlah persoalan dalam pengelolaan dana desa. Persoalan-persoalan tersebut harus dipahami sebaik-baiknya karena menyimpan berbagai potensi penyimpangan seperti korupsi dana desa.

Secara umum berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) UU No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tindak pidana korupsi diartikan:

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan

¹ Widjaja Haw. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, Hal 54

² Ni'matul Huda, *Perkembangan Hukum Tata Negara (Perdebatan dan Gagasan Penyempurnaan)*, Fakultas Hukum UII Press, Yogyakarta, 2014. Hal. 361.

perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (UU Nomor 60 tahun 2014). Sedangkan pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri Nomor 113 tahun 2014 yaitu, keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelola keuangan desa mewakili pemerintah desa, sehingga setiap kepala desa berhak untuk mengelola dan menggunakan dana desa dalam program maupun kegiatan yang bertujuan membangun dan mengembangkan desanya masing-masing.

Pengelolaan keuangan desa harus transparan, akuntabel, partisipatif dan dijalankan dengan tertip dan disiplin sesuai aturan yang berlaku. Menurut BPKP (2015), Transparan yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Akuntabel yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka

pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Partisipatif yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa. Tertip dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.

Tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan desa adalah segala tindakan yang dapat merugikan keuangan maupun perekonomian negara maupun desa. Sehingga segala tindakan yang dilakukan dapat merugikan masyarakat desa, pemerintah desa dan semua lapisan. Sama halnya dengan tindakan pidana korupsi secara umum, namun bedanya tindakan dilakukan oleh para oknum yang berkecimpung secara langsung dalam pengelolaan keuangan desa seperti kepala desa, Kepala Urusan Keuangan, dan oknum lainnya. Tindakan pidana korupsi yang sangat jelas dalam pengelolaan keuangan desa misalnya, adanya suap menyuap di lingkungan pemerintah desa, adanya gratifikasi yang diterima oleh oknum desa, penggelapan dana desa, dan tindakan lainnya yang dapat merugikan desa, daerah, dan negara. Namun bukan berarti karena faktor secara sengaja, melainkan tindakan tanpa sengaja pun bisa juga menyeret para aparat desa untuk mendepak dibalik jeruji sebagai tahanan.

Menurut Fockema Andreae, kata Korupsi berawal dari bahasa *latin corruptio atau corruptus*. *Corruptio* berasal dari kata *corrumpere*, suatu kata latin yang lebih tua. Dari bahasa latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris yaitu *corruption, corrupt*; Prancis yaitu *corruption*; dan Belanda yaitu

corruptie, korrupctie. Dari Bahasa Belanda inilah kata itu turun ke Bahasa Indonesia yaitu korupsi³

Istilah Korupsi berasal dari kata latin "corruptio" atau "corruptus" yang berarti kerusakan atau kebobrokan, atau perbuatan tidak jujur yang dikaitkan dengan keuangan. Ada pula yang berpendapat bahwa dari segi istilah "korupsi" yang berasal dari kata "corrupteia" yang dalam bahasa Latin berarti "bribery" atau "seduction", maka yang diartikan "corruptio" dalam bahasa Latin ialah "corrupter" atau "seducer". "Bribery" dapat diartikan sebagai memberikan kepada seseorang agar seseorang tersebut berbuat untuk keuntungan pemberi. Sementara "seduction" berarti sesuatu yang menarik agar seseorang menyeleweng.

Berikut adalah jenis dan penyebab penyalahgunaan dana desa yang dikemukakan:

1. Kesalahan karena ketidaktahuan (mekanisme)
2. Tidak sesuai rencana -> tidak jelas peruntukannya/tidak sesuai spesifikasi
3. Tidak sesuai pedoman, Juklak (Petunjuk Pelaksanaan), Juknis (Petunjuk Teknis) - > khususnya pengadaan barang dan jasa
4. Pengadministrasian laporan keuangan: Mark-up dan Mark-down, double counting.
5. Pengurangan Alokasi Dana Desa, misalnya dana desa dijadikan "pundi-pundi" kepala desa dan perangkat untuk kepentingan pribadi
6. Tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan
7. Penyelewengan aset desa: penjualan atau tukar guling Tanah Kas Desa

(Bengkok); penyewaan Tanah Kas Desa (TKD) yang bukan haknya, misalnya untuk perumahan bisnis property.

Korupsi bukan hanya terjadi pada lingkungan atas atau lingkungan bawah saja, melainkan semua lingkungan karena korupsi ranahnya luas dan menjalar. Korupsi merupakan tindakan melawan hukum, karena korupsi itu sendiri menyebabkan kerugian bagi negara dan masyarakat sebagai dampak dari tindakan tersebut. Korupsi dianggap sebagai penyakit sosial, mengingat dampak yang korupsi ini sangat merugikan negara dan masyarakat. Sebagai penyakit sosial, permasalahannya sejajar dengan penyakit sosial lainnya, seperti perjudian, prostitusi, narkoba, dan kriminalitas. Korupsi sangat merugikan negara dan rakyat kecil, sehingga dapat menghambat pembangunan infrastruktur dan dapat memberikan contoh yang buruk kepada orang lain dan generasi berikutnya. Selain itu korupsi juga menghancurkan sistem perekonomian, sistem demokrasi, sistem politik, sistem hukum, sistem pemerintahan, dan tatanan sosial kemasyarakatan di negeri ini. Korupsi juga telah terbukti melemahkan sumber daya, meresahkan kehidupan sosial, menggerogoti potensi negara-bangsa dan bahkan sudah menjadi masalah internasional.

Beberapa dampak yang ditimbulkan dari tindakan Korupsi yaitu :

- a. Dampak Ekonomi :
  1. Lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi

---

³ Andi Hamzah, 2006, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan*

Internasional, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, Hal. 4

2. Penurunan Produktifitas
3. Rendahnya kualitas barang dan jasa bagi publik
4. Menurunnya pendapatan negara dari sektor pajak
5. Meningkatnya hutang negara
- b. Dampak Sosial dan Kemiskinan Masyarakat
  1. Mahalnya harga jasa dan pelayanan publik
  2. Pengentasan kemiskinan berjalan lambat
  3. Terbatasnya akses bagi masyarakat miskin
  4. Meningkatnya angka kriminalitas
  5. Solidaritas sosial semakin langka dan demoralisasi
- c. Runtuhnya Otoritas Pemerintah
  1. Matinya etika sosial politik
  2. Tidak efektifnya peraturan dan perundang-undangan
  3. Birokrasi tidak efisien
- d. Dampak Terhadap Politik dan Demokrasi
  1. Munculnya kepemimpinan korup
  2. Hilangnya kepercayaan publik pada demokrasi
  3. Menguatnya pluktokrasi
  4. Hancurnya kedaulatan rakyat
- e. Dampak Terhadap Penegakan Hukum
  1. Fungsi pemerintahan mandul
  2. Hilangnya kepercayaan rakyat terhadap lembaga negara
- f. Dampak Pertahanan Dan Keamanan
  1. Kerawanan Hankamnas karena lemahnya alutsi dan SDM
  2. Lemahnya garis batas negara
  3. Menguatnya sisi kekerasan dalam masyarakat
- g. Dampak Kerusakan Lingkungan
  1. Menurunnya kualitas lingkungan
  2. Menurunnya kualitas hidup

Pemberantasan korupsi telah digadagadag sejak lama, dan telah menjadi salah satu fokus utama Pemerintah Indonesia pasca reformasi. Upaya demi upaya telah dijalankan, baik dalam mencegah maupun memberantas tindak pidana korupsi (tipikor) oleh semua lapisan baik eksekutif, legislatif dan yudikatif. Begitu juga dalam hal mencegah dan memberantas tipikor di tingkat desa, harus melibatkan peran dari berbagai pihak, diantaranya adalah:

1. Pemerintah Desa selaku eksekutif sekaligus pengelola Keuangan Desa, harus lebih berhati-hati dalam menjalankan pemerintahannya dengan disiplin mengikuti dan memahami semua aturan. Dan harus transparan, akuntabel serta bertanggungjawab.
2. BPD (Badan Permusyawaratan Desa) selaku pengawas yang mengontrol segala bentuk jalannya pemerintahan desa. Peran BPD dalam hal ini sangat penting dalam mencegah terjadinya tipikor, karena bila pengendalian dan pengawasannya baik maka tindak kecurangan bisa sangat diminimalisir.
3. Masyarakat Desa, dimana dalam hal ini masyarakat sangat berperan penting selaku *stakeholder* yang harus mengetahui kinerja dan laporan keuangan dari pemerintah desa.

Apabila semua lapisan desa berperan dengan baik, maka pengelolaan keuangan pun bisa dijaga. Koordinasi tidak cukup dilingkungan desa saja, harus sinergi setiap lapisan. Antara pemerintah pusat dengan daerah, pemerintah daerah ke pemerintah desa bahkan sebaliknya. Paradigma baru

dalam menanggulangi kejahatan dapat dilakukan dengan cara menghilangkan nafsu dan motivasi pelaku kejahatan untuk melakukan kejahatan, dengan cara menghalanginya untuk menikmati hasil atau buah dari kejahatan yang dilakukannya. Selain itu, pemberantasan tipikor oleh KPK dapat dijadikan acuan dalam menanggulangi tipikor dana desa. Adapun pemberantasan tipikor di Indonesia pada umumnya dan di lingkungan desa pada khususnya, ditempuh dengan melakukan:

1. Upaya pencegahan (preventif).
2. Upaya penindakan (kuratif).
3. Upaya edukasi masyarakat/mahasiswa.
4. Upaya edukasi LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat).

a. Pencegahan (Preventif)

1. Menanamkan semangat nasional yang positif dengan mengutamakan pengabdian pada bangsa, dan negara melalui pendidikan formal, informal dan agama.
2. Melakukan penerimaan pegawai berdasarkan prinsip keterampilan teknis.
3. Para pejabat dihimbau untuk mematuhi pola hidup sederhana dan memiliki tanggungjawab yang tinggi.
4. Para pegawai selalu diusahakan kesejahteraan yang memadai dan ada jaminan masa tua.
5. Menciptakan aparaturnya pemerintahan yang jujur dan disiplin kerja yang tinggi.
6. Sistem keuangan dikelola oleh para pejabat yang memiliki tanggung jawab etis tinggi dan dibarengi sistem kontrol yang efisien.
7. Melakukan pencatatan ulang terhadap kekayaan pejabat yang mencolok.

8. Berusaha melakukan reorganisasi dan rasionalisasi organisasi pemerintahan melalui penyederhanaan jumlah departemen beserta jawatan di bawahnya

b. Upaya Penindakan (Kuratif)

Upaya penindakan dilakukan kepada mereka yang terbukti melanggar dengan diberikan peringatan, dilakukan pemecatan tidak terhormat dan dihukum pidana. Beberapa contoh penindakan yang dilakukan oleh KPK :

1. Dugaan korupsi dalam pengadaan Helikopter jenis MI-2 Merk Ple Rostov Rusia milik Pemda NAD (2004).
2. Menahan Konsul Jenderal RI di Johor Baru, Malaysia, EM. Ia diduga meleakukan pungutan liar dalam pengurusan dokumen keimigrasian.
3. Dugaan korupsi dalam Proyek Program Pengadaan Busway pada Pemda DKI Jakarta (2004).
4. Dugaan penyalahgunaan jabatan dalam pembelian tanah yang merugikan keuangan negara Rp 10 milyar lebih (2004).
5. Dugaan korupsi pada penyalahgunaan fasilitas *preshipment* dan *placement* deposito dari BI kepada PT Texmaco Group melalui BNI (2004).
6. Kasus korupsi dan penyuaipan anggota KPU kepada tim audit BPK (2005).
7. Kasus penyuaipan panitera Pengadilan Tinggi Jakarta (2005).
8. Kasus penyuaipan Hakim Agung MA dalam perkara Probosutedjo.
9. Menetapkan seorang bupati di Kalimantan Timur sebagai tersangka dalam kasus korupsi

Bandara Loa Kolu yang diperkirakan merugikan negara sebesar Rp 15,9 miliar (2004).

10. Kasus korupsi di KBRI Malaysia (2005).

c. Upaya Edukasi Masyarakat/Mahasiswa

1. Memiliki tanggung jawab guna melakukan partisipasi politik dan kontrol sosial terkait dengan kepentingan publik.
2. Tidak bersikap apatis dan acuh tak acuh.
3. Melakukan kontrol sosial pada setiap kebijakan mulai dari pemerintahan desa hingga ke tingkat pusat/nasional.
4. Membuka wawasan seluas-luasnya pemahaman tentang penyelenggaraan pemerintahan negara dan aspek-aspek hukumnya.
5. Mampu memosisikan diri sebagai subjek pembangunan dan berperan aktif dalam setiap pengambilan keputusan untuk kepentingan masyarakat luas.

d. Upaya Edukasi LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) atau Institusi Pendidikan

1. Indonesia Corruption Watch (ICW) adalah organisasi non-pemerintah yang mengawasi dan melaporkan kepada publik mengenai korupsi di Indonesia dan terdiri dari sekumpulan orang yang memiliki komitmen untuk memberantas korupsi melalui usaha pemberdayaan rakyat untuk terlibat melawan praktik korupsi. ICW lahir di Jakarta pd tgl 21 Juni 1998 di tengah-tengah gerakan reformasi yang menghendaki pemerintahan pasca Soeharto yg bebas korupsi.
2. Transparency International (TI) adalah organisasi internasional yang bertujuan memerangi korupsi politik dan didirikan di

Jerman sebagai organisasi nirlaba sekarang menjadi organisasi non-pemerintah yang bergerak menuju organisasi yang demokratis. Publikasi tahunan oleh TI yang terkenal adalah Laporan Korupsi Global. Survei TI Indonesia yang membentuk Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia 2004 menyatakan bahwa Jakarta sebagai kota terkorup di Indonesia, disusul Surabaya, Medan, Semarang dan Batam. Sedangkan survei TI pada 2005, Indonesia berada di posisi keenam negara terkorup di dunia. IPK Indonesia adalah 2,2 sejajar dengan Azerbaijan, Kamerun, Etiopia, Irak, Libya dan Usbekistan, ser-ta hanya lebih baik dari Kongo, Kenya, Pakistan, Paraguay, Somalia, Sudan, Angola, Nigeria, Haiti & Myanmar. Sedangkan Islandia adalah negara terbebas dari korupsi.

Penyuluhan Hukum dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilakukan di Desa Suka Beras Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai bertujuan untuk memberikan edukasi dan wawasan tentang tindak pidana korupsi, fenomena, dampak, serta upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan dana desa yang mana pengelolaan keuangan desa merupakan segala tindakan yang dapat merugikan keuangan maupun perekonomian negara maupun desa. Banyak fenomena yang menjerat aparatur desa khususnya kepala desa, dalam pengelolaan keuangan dan dana desa.

B. Analisis Situasi

Pengabdian Kepada Masyarakat dilaksanakan dengan model penyuluhan hukum berjudul Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Dana Desa di

Desa Suka Beras Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai.

Desa Suka Beras Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai mempunyai batas wilayah di sebelah utara berbatasan dengan Desa Lubuk Dendang, Pematang Kasih/ Pematang Tatal, sebelah selatan berbatasan dengan Pasar Bengkel/Suka Beras, sebelah timur dengan lidah tanah dan sebelah barat berbatasan dengan Cinta Air dan Ara Payung dengan luas wilayah kurang lebih 175,4 Ha dan jumlah penduduknya 1.200 (seribu dua ratus) jiwa dengan jumlah kepala keluarga 315 (tiga ratus lima belas) kepala keluarga. Masyarakat Desa Suka Beras mayoritas beragama Islam, disamping terdapat masyarakat yang beragama Kristen dengan mata pencarian pada umumnya adalah buruh tani, petani, wiraswasta, pedagang, Pegawai Negeri Sipil dan lain-lain.

Sejarah Desa Suka Beras Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai diawali pada tahun 1945, pada masa peperangan Negara Indonesia dengan Belanda, banyak rakyat yang kekurangan beras, sehingga rakyat mencari beras keseluruh daerah. Rakyat mendengar bahwa Desa Suku beras adalah lumbung padi yang banyak memiliki padi sehingga banyak orang yang mencai desa ini untuk mendapatkan padi yang digiling menjadi beras, akan tetapi seiring berjalannya waktu, nama desa ini berubah menjadi Desa Suka Beras. Desa Suka Beras Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai memiliki

banyak suku antara lain suku melayu, suku banjar, jawa, minangdan suku batak dengan kehidupan masyarakat yang masih kuat terhadap adat istiadat, tradisi peninggalan leluhur, upacara adat yang berhubungan dengan siklus kehidupan manusia seperti upacara kelahiran, khitanan, perkawinan, upacara kematian dan lain-lain. Masyarakat Desa Suka Beras juga masih kuat dengan budaya gotong royong, kebiasaan untuk menjenguk tetangga atau keluarga yang kemalangan, sakit, ditimpa musibah, masing sering membantu memperbaiki rumah tetangga yang rusak, membantu tetangga yang mengadakan perhelatan, membantu musim tanam dan panen dan lain-lain.⁴

Struktur organisasi dan tata kerja Pemerintahan Desa Suka Beras Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai meliputi :

1. Desa suka beras terdiri dari Kepala Desa dan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD)
2. Pemerintahan Desa Suka Beras meliputi: Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Kepala KASI yang terdiri dari KASI Keuangan, KASI Pelayanan dan Kesejahteraan, KASI Pemerintahan, KASI Umum an Perencanaan serta Kepala Dusun yang terdiri dari 3 (Tiga) dusun yaitu Dusun I, Dusun II dan Dusun III
3. Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) terdiri dari 4 (empat) orang BPD, yang telah mendapat pengesahan dari Bupati Serdang Bedagai.

---

⁴ Profil Desa Suka Beras Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021

4. Lembaga Kemasyarakatan Desa meliputi : Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD), Tim Penggerak PKK, Karang Tarunan, PP dan Himpunan Keluarga Tani Indonesia (HKTI)

Desa Suka Beras Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai ini, mulai tahun 1955 sampai dengan tahun 2021 telah beberapa kali dipimpin oleh Kepala Desa yaitu:

- a. Subari sebagai penghulu tahun 1955 s/d 1965
- b. Subari sebagai penghulu tahun 1965 s/d 1968
- c. Abdul Wahab sebagai penghulu tahun 1968 s/d 1990
- d. Abdul Wahab sebagai penghulu tahun 1990 s/d 2000
- e. Mhd. Arsyad sebagai penghulu tahun 2000 s/d 2004
- f. Mhd. Arsyad sebagai penghulu tahun 2004 s/d 2014
- g. Khairul Kusni sebagai Plt. Kades tahun 2014 s/d 2016
- h. Mhd. Arsyad sebagai Kepala Desa Tahun 1998 s/d 2022

Dengan 3 (tiga) orang Kepala Dusun yaitu Kepala Dusun I bernama Ali Rahman, Kepala Dusun II bernama Syarifuddin, dan Kepala Dusun III bernama Muhammad Amin. Sekarang ini Desa Suka Beras Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai dipimpin oleh seorang Kepala Desa bernama Mhd. Arsyad dengan Sekretaris desa bernama Hermansyah

Penduduk desa 1.200 jiwa sampai 04 Februari 2021, merupakan jumlah Kepala

Keluarga sebanyak 315 KK. Dengan luas pemukiman 50 Ha. Dengan perincian penggunaan lahan pertanian swah 175 Ha, lahan pertanian bukan sawah 15 Ha.

Rincian :

Tabel 1
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah (jiwa)
1	Laki-laki	502
2	Perempuan	698
Jumlah		1.200

Sumber Data : Profil Desa Suka Beras Tahun 2021

Tabel 2
Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan

No	Pekerjaan	Jumlah (orang)
1	Wiraswasta	278
2	Petani	145
3	Buruh Tani	720
4	Pegawai Negeri	10
5	Pedagang	572
6	DII	175
Jumlah		1.200

Sumber Data : Profil Desa Suka Beras Tahun 2021

Tabel 3
Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

No	Agama	Jumlah (orang)
1	Islam	1.186
2	Kristen	4
3	Katolik	-
Jumlah		1.190

Sumber Data : Profil Desa Suka Beras Tahun 2021

Tabel 4
Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah (orang)
1	Sarjana/Diploma 4	38
2	SLTA/Sederajat	521
3	SLTP/Sederajat	169
4	SD/Sederajat	200
5	TK/PAUD	25
Jumlah		953

Sumber Data : Profil Desa Suka Beras Tahun 2021

Tabel 5
Berdasarkan Suku Dominan

No	Suku	Jumlah (orang)
1	Melayu	45
2	Batak/Mandailing	4
3	Jawa	206
4	Kalimantan	945
Jumlah		1.200

Sumber Data : Profil Desa Suka Beras Tahun 2021

Tabel 6
Jenis Bangunan Rumah

No	Bangunan Rumah	Jumlah (unit)
1	Permanen	76
2	Semi Permanen	87
3	Tidak Permanen	69
4	Tidak Layak Huni	25
Jumlah		257

Sumber Data : Profil Desa Suka Beras Tahun 2021

Tabel 7
Tempat Ibadah

No	Tempat Ibadah	Jumlah (unit)
1	Mesjid	1
2	Musholla	1
3	Gereja (Kristen)	-
4	Gereja (Katolik)	-
Jumlah		2

Sumber Data : Profil Desa Suka Beras Tahun 2021

Tabel 8
Jumlah Sekolah

No	Sekolah	Jumlah (unit)
1	TK/Paud	1
2	SD Negeri	1
3	SMP/Sederajat	1
Jumlah		3

Sumber Data : Profil Desa Suka Beras Tahun 2021

Tabel 11
Potensi Desa

No	Jenis	Luas/Jumlah
1	Pertanahan	225 Ha

	a. Tanah sawah irigasi	
2	Peternakan a. Kerbau b. Babi c. Ayam d. Bebek e. Kambing f. Lembu	10 ekor - 1.200 ekor 3.000 ekor 75 ekor 2 ekor

Sumber Data : Profil Desa Suka Beras Tahun 2021

Pada umumnya pendidikan yang ditamatkan oleh sebagian besar penduduk desa ini adalah SD dan SLTP. Namun demikian, sejak tahun 2000an mulai banyak penduduk yang mengenyam pendidikan SLTA, bahkan di perguruan tinggi. Meningkatnya taraf pendidikan ini dikarenakan kesadaran pola pikir dan peningkatan kemampuan ekonomi penduduk untuk menyekolahkan anak-anaknya, terutama para penduduk yang menetap di Suka Beras.

Sebagian besar penduduk Desa Suka Besar bermata pencaharian sebagai buruh tani, sebagian lainnya bekerja sebagai buruh bangunan, penggalas buah, berdagang, dan sebagian kecil pegawai negeri.

Sekitar sebagian jumlah bangunan rumah penduduk masih berupa bangunan non permanen, sedangkan separuh lainnya sudah permanen. Bangunan-bangunan rumah penduduk yang non permanen. Keadaan ini menunjukkan kesejahteraan ekonomi penduduk desa yang belum merata.

Kehidupan masyarakat Desa Suka Beras sangat kental dengan tradisi-tradisi peninggalan leluhur. Upacara-upacara adat yang berhubungan dengan siklus hidup manusia (lahir-dewasa / berumah tangga-mati), seperti upacara kelahiran, khitanan,

perkawinan dan upacara-upacara yang berhubungan dengan kematian, selalu dilakukan oleh warga masyarakat.

Kegotongroyongan pada masyarakat masih kuat. Kebiasaan menjenguk orang sakit (tetangga atau sanak keluarga) masih dilakukan oleh masyarakat. Biasanya ketika menjenguk orang sakit, bukan makanan yang dibawa, tetapi mereka mengumpulkan uang bersama-sama warga untuk kemudian disumbangkan kepada si sakit untuk meringankan beban biaya. Kebiasaan saling membantu memperbaiki rumah atau membantu tetangga yang mengadakan perhelatan juga masih dilakukan. Semua itu menggambarkan bahwa hubungan ketetanggaan di desa ini masih erat/kuat.

Kesenian yang paling disukai oleh warga desa ini adalah kesenian daerah seperti Kasidah, Marhaban, dan Nasid. Namun belakangan ini pada pemuda cenderung lebih menyukai music dangdut, dan music-musik modern lainnya. Kelompok-kelompok kesenian tradisional tampak mulai mengendor kegiatannya, sedangkan kelompok-kelompok kesenian modern (band dan keyboard) tampak bermuculan.

Kondisi kesehatan masyarakat tergolong cukup baik, terutama setelah adanya Puskesmas dan Polindes. Namun demikian, pada musim-musim tertentu warga sering mengalami gangguan kesehatan, terutama ISPA (Infeksi Saluran Pernafasan Akut). Keberadaan balita kurang gizi sudah mulai berkurang, selaras dengan semakin baiknya perekonomian masyarakat. Karena digalakkannya Posyandu dan pemberian makan tambahan dan penyuluhan kesehatan.

Kegiatan pengamanan (siskamling) desa secara bersama tergolong masih baik meskipun tampak mulai mengendor. Kendornya kegiatan siskamling ini ditengarai karena semakin banyak waktu yang digunakan oleh warga masyarakat untuk mencari nafkah (bekerja).

Di desa ini telah terhubung dengan daerah lain melalui jalan desa. Keadaan jalan desa secara cukup baik, namun apabila musim hujan tiba di beberapa tempat mengalami kerusakan jalan. Dan penerangan jalan pun sangat minim. Jalan-jalan Kabupaten sepanjang ± 3 km dan jalan desa baru sekitar ± 1100 m dari jalan desa yang ada di Desa Suka Beras.

Sarana transportasi yang paling banyak digunakan warga masyarakat adalah sepeda motor. Di desa ini belum ada sarana transportasi umum, seperti bus, mikrolet atau sejenisnya.

Jaringan listrik dari PLN sudah tersedia di desa ini, tetapi jalan yang menuju ke Dusun II masih belum ada tiang listrik sepanjang ± 800 meter sehingga jalan pada malam hari sangat gelap. Padahal banyak desa yang menggunakan jalan tersebut baik siang maupun malam, seperti Desa Lubuk Dendang, Pem. Kasih, Lidah Tanah, Pem. Tatal, Lubuk Saban, Cinta Air, Taban, Pem. Gunung, dan lainnya.

RKP-Des Desa Suka Beras ini merupakan penjabaran dari RPJMD Desa Suka Beras dan dijadikan sebagai dokumen atau acuan arah perencanaan tahunan Desa Suka Beras untuk 2022.

RKP-Des yang dimaksud telah dibahas dalam aplikasi Pemerintah Desa melalui musyawarah desa yang dihadiri oleh unsur perangkat Pemerintah Desa, BPD, LKMD,

TP PKK, Tokoh Agama dan Tokoh Musyawarah serta kalangan unsur pemula.

Diharapkan RKP-Des tersebut dapat terlaksana sesuai dengan kemampuan dana APBDes dan potensi sumber daya partisipasi masyarakat (gerbang swara) serta bantuan lainnya yang dapat dimanfaatkan.

C. Pihak Yang dilibatkan

Adapun para pihak yang dilibatkan dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat di Desa Suka Beras, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai ini adalah :

- a. Kepala Desa Suka Beras, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai.
- b. Sekretaris Desa Suka Beras, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai.
- c. Kepala Dusun I, II dan III Desa Suka Beras, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai.
- d. Perangkat Desa terdiri dari Kepala Urusan Umum dan Perencanaan, Kepala Urusan Keuangan, Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Seksi Pelayanan dan Kesejahteraan Desa Suka Beras, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai.
- e. Pemuka atau Tokoh Masyarakat Desa Suka Beras, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai.
- f. Anggota Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Desa Suka Beras, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai.
- g. Anggota Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) Desa Suka

Beras, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai.

- h. Anggota Masyarakat Desa Suka Beras, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai.
- i. Peserta Praktek Kerja Lapangan (PKL).
- j. Dosen Fakultas Hukum UISU
- k. Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum UISU
- l. Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara (UISU)

II. Pelaksanaan Kegiatan

A. Model Pelaksanaan Kegiatan

Model pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat adalah Penyuluhan hukum tentang Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Dana Desa yang disampaikan oleh Dosen Fakultas Hukum UISU yaitu Hj, Susilawati, SH.,M.Hum. Peserta penyuluhan hukum yaitu Kepala Desa Suka Beras, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, Sekretaris Desa Suka Beras, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, Kepala Dusun I, II dan III Desa Suka Beras, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, Perangkat Desa terdiri dari Kepala Urusan Umum dan Perencanaan, Kepala Urusan Keuangan, Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Seksi Pelayanan dan Kesejahteraan Desa Suka Beras, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, Pemuka atau Tokoh Masyarakat Desa Suka Beras, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, Anggota Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Desa Suka Beras, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, Anggota Lembaga Ketahanan Masyarakat

Desa (LKMD) Desa Suka Beras, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, Anggota Masyarakat Desa Suka Beras, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, Peserta Praktek Kerja Lapangan (PKL), Dosen Fakultas Hukum UISU, Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum UISU, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara (UISU).

Setelah dilakukan pemaparan materi penyuluhan hukum tentang Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Dana Desa selanjutnya dilakukan sesi tanya jawab antara penyuluh hukum sebagai pemateri dan peserta untuk meningkatkan wawasan tentang pencegahan korupsi di Desa Suka Beras, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai.

Sebelum penyusunan proposal Program Pengabdian Kepada Masyarakat ini, dilakukan observasi lapangan ke Desa Suka Beras, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, sekaligus melakukan koordinasi dengan Kepala Desa tentang rencana kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat berupa penyuluhan hukum dengan judul Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Dana Desa.

Pada awal Oktober tahun 2021 dilakukan penyusunan proposa Pengabdian Kepada Masyarakat yang akan diajukan kepada pimpinan Fakultas Hukum. Setelah disetujui, kemudian dilakukan pengurusan izin kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilanjutkan dengan diskusi penentuan jadwal dan teknis pelaksanaan serta jenis kegiatan bersama dengan Kepala dan

Sekretaris Desa Suka Beras, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai. Berdasarkan diskusi tersebut, disepakati kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilaksanakan selama 2 (dua) hari yaitu pada hari senin sampai dengan selasa tanggal 15-16 November Tahun 2021 pada Pukul 08.30 Wib s/d selesai bertempat di Aula atau Balas Desa Suka Beras, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai.

Kegiatan hari pertama, Senin tanggal 15 November 2021, dilakukan persiapan pelaksanaan sarana dan prasarana seperti meja, kursi yang berjarak sebagaimana protokol kesehatan covid-19, *in focus*, laptop, pengeras suara, materi dan foto copy materi serta spanduk Pengabdian Kepada Masyarakat. Disamping itu, tim Pengabdian Kepada Masyarakat menyediakan *snack* dan makan siang yang akan dibagikan kepada para peserta serta cenderamata yang diberikan kepada Kepala Desa Suka Beras, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai sebagai kenang-kenangan.

Peserta yang hadir adalah Kepala Desa Suka Beras, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, Sekretaris Desa Suka Beras, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, Kepala Dusun I, II dan III Desa Suka Beras, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, Perangkat Desa terdiri dari Kepala Urusan Umum dan Perencanaan, Kepala Urusan Keuangan, Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Seksi Pelayanan dan Kesejahteraan Desa Suka Beras, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, Pemuka atau Tokoh Masyarakat Desa Suka Beras,

Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, Anggota Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Desa Suka Beras, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, Anggota Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) Desa Suka Beras, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, Anggota Masyarakat Desa Suka Beras, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, Peserta Praktek Kerja Lapangan (PKL), Dosen Fakultas Hukum UISU, Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum UISU, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara (UISU) dengan jumlah peserta adalah 45 orang.

Kegiatan dimulai dengan pembukaan oleh pembawa acara, dilanjutkan dengan sambutan dari Kepala Desa Suka Beras, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai dan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara yang sekaligus membuka Program Pengabdian Kepada Masyarakat. Selanjutnya pemaparan materi penyuluhan hukum pada hari Pertama.

Pada hari kedua dilakukan penyuluhan hukum dengan judul materi adalah Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Dana Desa yang disampaikan oleh Hj. Susilawati, SH.,M.Hum. Kemudian diikuti dengan tanya jawab antara penyuluh hukum dengan peserta yang dipnadu oleh Moderator dari mahasiswa sebagai salah satu tim Pengabdian Kepada Masyarakat. Pada tahap ini muncul berbagai pertanyaan yang diajukan kepada pemateri sebagai penyuluh hukum. Hal tersebut menunjukkan bahwa partisipasi aktif peserta dan

keingintahuan terhadap tema kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang cukup tinggi. Berdasarkan tanya jawab yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa edukasi peserta dalam bidang pendidikan anti korupsi meningkat terlebih hal ini sangat dibutuhkan dalam upaya preventif atau pencegahan tindak pidana korupsi di lingkungan pedesaan

B. Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat di Desa Suka Beras, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai berlangsung selama 2 (dua) hari dapat disimpulkan berjalan secara baik dan efektif. Keadaan ini dapat dilihat adanya peningkatan wawasan, pemahaman dan pengetahuan masyarakat terhadap materi yang disampaikan tentang Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Dana Desa melalui antusias masyarakat sebagai peserta dalam mengajukan pertanyaan yang dibukan pada sesi dialog tanya jawab mengenai permasalahan tindak pidana korupsi pengelolaan dana desa.

Masyarakat yang sebelumnya tidak mengetahui jenis dan bentuk tindakan yang dikategori korupsi, akibat hukum dan sanksi bagi pelaku serta upaya pencegahannya, setelah dilakukan penyuluhan hukum pada program Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat, peserta menjadi paham dan mengerti. Peserta menjadi sadar akan dampak akan kerugian besar yang ditimbulkan dari tindakan tersebut.

Diakhir kegiatan para peserta penyuluhan hukum berkomitmen untuk

mengawasi para aparaturnya, sama-sama membangun desa yang jujur dan berkomitmen untuk melakukan pencegahan tindakan korupsi dimanapun dan kapanpun. Hal ini tentunya sejalan dengan keinginan, tujuan dan harapan dari tim pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat.

C. Luaran Kegiatan

Adapun luaran kegiatan yang diharapkan dari kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat adalah mengedukasi masyarakat dan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang tindak pidana korupsi pengelolaan dana desa serta sebagai upaya preventif atau upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi dana desa di lingkungan Desa Suka Beras, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai. Bagi Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara (UISU) kegiatan ini telah mewujudkan Peran Institusi Pendidikan dalam hal Tridharma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan, Penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat akan tertuang didalam Laporan Pengabdian Kepada Masyarakat, Penelitian yang melibatkan Mahasiswa dan Jurnal.

III. Tindak Lanjut

Pengabdian kepada Masyarakat dengan model penyuluhan hukum tentang Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Dana Desa memberikan dampak positif bagi peserta sebagai anggota masyarakat Desa Suka Beras, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, antara lain:

- a. Mengedukasi masyarakat tentang Pencegahan tindak pidana Korupsi pengelolaan dana desa.
- b. Sebagai upaya preventif atau upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi di Desa Suka Beras, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai.
- c. Masyarakat mengerti dan memahami tentang akibat hukum yang ditimbulkan dari tindakan korupsi.
- d. Masyarakat memahami jenis dan bentuk-bentuk korupsi.
- e. Masyarakat mengetahui upaya dan langkah-langkah apa saja dalam menanggulangi tindak pidana Korupsi
- f. Para peserta dari kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat memperoleh materi-materi sosialisasi yang disampaikan oleh tim serta kasus-kasus yang digunakan untuk diskusi dan presentasi.
- g. Terwujudnya Pendidikan Anti Korupsi di lingkungan Masyarakat Desa Suka Beras, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai.

Setelah dilakukannya Pengabdian Kepada Masyarakat berupa penyuluhan hukum di Desa Suka Beras, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai dan adanya pengamatan serta evaluasi dari tim, ternyata diperoleh kesimpulan bahwa Penyuluhan Hukum pada kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan judul Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Dana Desa, masih perlu ditingkatkan lagi jumlah frekuensi kegiatan dan pertemuannya di berbagai tempat dengan peserta yang sama maupun peserta lain yang bertambah dan berbeda misalnya